



**PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA
MENURUT SAK (STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN) STUDI KASUS UD. SBHSP
SEMBAKO DI DESA HURISTAK
KABUPATEN PADANG
LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi dan Keuangan*

Oleh

**SARIPAH AINI LUBIS
NIM. 18 402 00113**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA MENURUT
SAK (STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN) STUDI KASUS UD. SBHSP
SEMBAKO DI DESA HURISTAK
KABUPATEN PADANG
LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi dan Keuangan*

Oleh

**SARIPAH AINI LUBIS
NIM. 18 402 00113**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



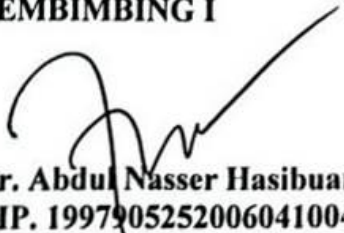
**PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA
MENURUT SAK (STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN) STUDI KASUS UD. SBHSP
SEMBAKO DI DESA HURISTAK
KABUPATEN PADANG
LAWAS**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Akuntansi dan keuangan*

**Oleh:
SARIPAH AINI LUBIS
NIM 18 402 00113**

PEMBIMBING I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 1997905252006041004**

PEMBIMBING II


**Artj Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. SARIPAH AINI LUBIS
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Saripah Aini Lubis** yang berjudul "**Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 1997905252006041004

PEMBIMBING II


Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripah Aini Lubis
NIM : 18 402 00113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



Saripah Aini Lubis
NIM . 18 402 00113

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saripah Aini Lubis
NIM : 18 402 00113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Saripah Aini Lubis
NIM. 18 402 00113



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SARIPAH AINI LUBIS
NIM : 18 402 00113
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
**Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK
(Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP
Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas**

Ketua

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN. 2025057902**

Sekretaris

**Azwar Hamid, MA
NIDN. 2111038601**

Anggota

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN. 2025057902**

**Azwar Hamid, MA
NIDN. 2111038601**

**Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301**

**H. Ali Hardaana, M.Si
NIDN. 201318301**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Juli 2023
Pukul : 14.00 Wib – 16.30 Wib
Hasil/Nilai : Lulus/ 70,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.38
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA
MENURUT SAK (STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN) STUDI KASUS UD. SBHSP
SEMBAKO DI DESA HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**


NAMA : **SARIPAH AINI LUBIS**

NIM : **18 402 00113**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi
Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuna, 10 September 2023



Dekan

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ✓
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Saripah Aini Lubis
NIM : 18 402 00113
Judul : **Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas**

Perlakuan akuntansi yang tepat atas piutang usaha dapat berpengaruh penting pada laporan keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tepat sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan. UD. SBHSP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sembako. UD. SBHSP Sembako masih menyusun laporan keuangannya secara manual dikarenakan kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang Standar Akuntansi Keuangan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan SAK yang berlaku. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perlakuan piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang usaha pada UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai perlakuan akuntansi piutang usaha, dengan ruang lingkup mengenai akuntansi, piutang, transaksi dan bukti transaksi, akuntansi piutang usaha dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik penjamin keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dan mengadakan *member chek* serta teknik pengolahan dan analisis data.

Hasil dari penelitian ini mengenai perlakuan piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas. Dari segi pengakuan dan pencatatan UD. SBHSP sudah sesuai dengan dengan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 55. Dimana dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi dan pencatatan sesuai dengan SAK ETAP dimana pencatatan piutang dilakukan dengan basis akrual. Sedangkan dari segi pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang yang dilakukan UD. SBHSP belum sesuai dengan SAK yang berlaku yaitu SAK ETAP, karena piutang yang disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih dan hal tersebut tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : *Perlakuan Akuntansi, Piutang Usaha, Standar Akuntansi Keuangan*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul " **Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.E.I, M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah

memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Mahmud Lubis dan Ibunda Siti Khadijah Daulay yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putri-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Terima kasih kepada adik-adik peneliti Putriani Lubis, Indah Marini Lubis, Rafli Amar Sihombing dan keluarga peneliti dari keluarga ayah bou, Udak dan keluarga ibu Uwak, Tulang yang selalu memotivasi dan mensupport peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan, rezeki, dan umur yang berkah agar kita semua bisa berkumpul lagi.
9. Kawan-kawan seperjuangan yang ada di ruangan Akuntansi I angkatan 2018. Senantiasa selalu memberikan informasi, nasehat, arahan serta motivasi buat peneliti dalam menyelesaikan skripsi peneliti.

10. Terima kasih kepada teman-teman peneliti yaitu Eli Syafitri dan Laili Syahirah Harahap selaku tim Support yang selalu membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKL Patiluban Hilir Mandailing Natal yang mendo'akan serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi hingga sampai ketahap ini.

11. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan rezeki.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan disebabkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki peneliti masih terbatas. Maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidempuan, Juli 2023

Peneliti

Saripah Aini Lubis
NIM. 18 402 00113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Akuntansi.....	10
a. Pengertian Akuntansi.	10
b. Akuntansi dalam Perspektif Islam	12
c. Asumsi Dasar Akuntansi.....	14
d. Siklus Akuntansi.....	15
e. Metode Pencatatan Akuntansi	16
f. Tujuan Akuntansi	17
2. Piutang.....	19
a. Pengertian Piutang.....	19
b. Piutang dalam Perspektif Islam.....	21
c. Klasifikasi Piutang	22
d. Piutang Tak Tertagih.....	24
3. Transaksi dan Bukti Transaksi.	28
a. Pengertian Transaksi dan Bukti Transaksi.	28
b. Fungsi Bukti Transaksi.....	30

c. Jenis-Jenis Bukti Transaksi.....	32
4. Akuntansi Piutang Usaha	34
a. Akuntansi Piutang dalam Perspektif Islam.	34
b. Perlakuan Akuntansi Keuangan	38
5. Standar Akuntansi Keuangan (SAK).....	41
B. Penelitian Terdahulu.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	64
B. Jenis Penelitian	65
C. Subjek Penelitian.....	66
D. Sumber Data	66
1. Sumber Data Primer	66
2. Sumber Data Sekunder.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
1. Dokumentasi.....	67
2. Observasi	67
3. Dokumentasi.....	68
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	68
1. Perpanjangan Keikutsertaan	68
2. Ketekunan Pengamatan	69
3. Triangulasi.....	69
4. Mengadakan <i>Member Chek</i>	69
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Gambaran Umum UD. SBHSP Sembako.....	71
1. Sejarah Singkat UD. SBHSP Sembako	71
2. Lokasi dan Tata Letak Usaha UD. SBHSP Sembako.	71
3. Tujuan Usaha UD. SBHSP Sembako.....	72
4. Visi dan Misi Perusahaan.	72
5. Kegiatan Operasional Usaha UD. SBHSP Sembako.	72
B. Analisis Hasil Penelitian.....	73
C. Pembahasan Hasil Penelitian	75
1. Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha UD. SBHSP Sembako.....	75
2. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang Diterapkan Pada UD. SBHSP Sembako Serta Kesesuaiannya Dengan SAK Yang Mengatur Tentang Piutang Usaha.....	79
D. Keterbatasan Penelitian.....	83

BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel IV.1	Struktur Organisasi UD. SBHSP	56
Tabel IV.2	Analisa Perbandingan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang Diterapkan Pada UD. SBHSP Serta Kesesuaiannya dengan SAK Yang Mengatur Tentang Piutang Usaha	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Alur Perlakuan Piutang pada UD. SBHSP	56
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang maupun organisasi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dimana kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan merupakan bentuk organisasi yang mempunyai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dalam memperoleh laba. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus bertindak untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menjual barang-barang atau membuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹

Suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan persaingan apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang modal untuk periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.²

¹ Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4-5.

² Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba Cetakan ke II*, (Jakarta: PT Grasindo, 2018), hlm. 90.

Perusahaan juga dapat melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Setiap perusahaan pasti membutuhkan pelanggan, baik yang bergerak di bidang dagang, jasa, maupun manufaktur. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan berasal dari pelanggan yang telah membayar tagihannya. Pembayaran tagihan tersebut dapat berupa tunai atau kredit. Tagihan secara tunai adalah tagihan yang dibayar oleh pelanggan sehingga perusahaan memperoleh kas secara langsung, sedangkan tagihan secara kredit adalah tagihan yang dibayar oleh pelanggan secara tidak langsung.

Tagihan secara kredit ini menimbulkan yang namanya piutang. Kebijakan tagihan secara kredit sangat menguntungkan karena pelanggan tidak perlu mengeluarkan kas secara langsung melainkan pelanggan dapat melakukan cicilan atau pembayaran dari waktu ke waktu.³ Penjualan secara kredit akan menyebabkan masalah timbulnya resiko yang signifikan pada saat pembayaran kepada perusahaan, sedangkan penjualan tunai tidak akan menimbulkan masalah piutang bagi perusahaan. Piutang dinilai sangat penting karena merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan piutang sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan.

Piutang dagang adalah jumlah piutang dari pelanggan yang terjadi karena transaksi penjualan barang atau jasa. Umumnya piutang dagang memiliki jangka waktu perlunasan 30-60 hari tergantung syarat kredit seperti: n/30, n/45, atau

³ Anditto Farlinno, "Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Usaha pada PT. Inti Rimba Persada", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015), hlm. 1.

n/eom. Dokumen pendukung piutang dagang biasanya berupa dokumen jual beli seperti: faktur penjualan dan surat jalan pengiriman, tanpa perjanjian tertulis dari yang berhutang.⁴ Piutang yang tidak dapat ditagih menyebabkan perusahaan harus melakukan perlakuan akuntansi piutang yang tepat untuk mengelola piutang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian piutang. Hal ini dilakukan agar nilai piutang yang disajikan adalah nilai yang benar-benar dapat ditagih. Terkadang perusahaan tidak mengetahui siapa saja pelanggannya yang tidak dapat melunasi hutangnya, maka perusahaan mengalami kesulitan dalam menyajikan nilai piutang yang benar-benar dapat ditagih di dalam laporan posisi keuangan.⁵

Perlakuan akuntansi yang tepat atas piutang usaha dapat berpengaruh penting pada laporan keuangan dan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan lembaga syariah maupun lembaga non syariah, jadi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah komponen kesatuan yang utuh dan komprehensif dalam pembahasan pencatatan transaksi lembaga keuangan syariah yang tepat sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan. karena standar akuntansi memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Jika perlakuan akuntansi piutang usaha berpedoman pada

⁴ Michell Suharli, *Akuntansi untuk Bisnis dan Dagang*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2013), hlm. 202.

⁵ Nur Muhammad Asriadi, Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Piutang pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar, *jurnal Economic Bosowa*, Vol, No. 003, Juli- September 2020.

standar akuntansi keuangan piutang usaha yang tepat, maka laporan keuangan akan mencerminkan suatu penilaian yang wajar.

Adapun Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK syariah yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran adalah PSAK No. 103 dan PSAK No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

UD. SBHSP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sembako. Usaha ini beralamatkan di desa huristak kabupaten Padang Lawas. Salah satu bentuk organisasi usaha yang bergerak dibidang penjualan barang-barang sembako yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh laba. Dalam proses kegiatan operasionalnya, UD. SBHSP melakukan penjualan baik secara tunai maupun secara kredit kepada pelanggan. Biasanya pelanggan memberikan daftar barang yang akan dibeli atau dipesan kepada UD. SBHSP, apabila pesanan barang sudah diserahkan UD. SBHSP, proses pembayarannya pelanggan kepada perusahaan dengan cara mencicil atau membayar sebagian dari belanjanya.

Piutang bagi UD. SBHSP akan berdampak pada penerimaan pendapatan bagi perusahaan. Pengendalian terhadap perlakuan akuntansi piutang pada UD. SBHSP Sembako diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai piutang usaha yang akurat, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak pengelola agar tercapainya laba dan perkembangan usaha UD. SBHSP Sembako kedepannya.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Arjun Hasibuan selaku pemilik UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa:

“Memang sudah menerapkan akuntansi dalam penyusunan, penyajian dan pelaporan. Akan tetapi penyusunan laporan masih dilakukan secara manual, dan masih kekurangan sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, UD. SBHSP Sembako belum sepenuhnya menjalankan usahanya dengan SAK yang berlaku. Pada perlakuan piutang usaha UD. SBHSP mengenai dan pengukuran diatur dengan PSAK No. 55, penyajian dan pengungkapan diatur oleh SAK ETAP belum diterapkan. Sedangkan pengakuan dengan PSAK No. 55 dan pencatatan diatur SAK ETAP sudah sesuai dengan SAK yang berlaku. Piutang akan disajikan dalam laporan sebagai salah satu akun dalam neraca laporan keuangan. Pelaporan keuangan di Indonesia harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu diadakannya sebuah penelitian dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas”**.

⁶ Wawancara dengan Bapak Arjun Hasibuan selaku pemilik UD. SBHSP Sembako Pada 25 Juni 2022 Pukul 15.09 WIB.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian agar pembahasan ini lebih terfokus dan terarah pada permasalahan yang dibahas. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi dengan Perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK yang diterapkan selama ini pada usaha UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perlakuan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap sesuatu.⁷ Yang dimaksud perlakuan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi yang digunakan usaha UD. SBHSP Sembako.
2. Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak dalam mengambil keputusan.⁸
3. Piutang usaha adalah piutang yang diharapkan perusahaan dapat tertagih dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

⁷ <http://www.artikata.com>, Diakses 07 Maret 2022 Pukul 19:09 WIB.

⁸ Sunarno Sastroatmadjo, Eddy Purnairawan, *Pengantar Akuntansi*, (bandung: Media Sains Indonesia, 2012), hlm. 1.

4. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar menyajikan petunjuk dan aturan tindakan bagi akuntan publik yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan perusahaan serta saat membuktikan kewajarannya.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diperoleh suatu rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat sebuah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi piutang usaha pada UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan atau yang dilaksanakan harus memiliki manfaat bagi pihak yang terlibat dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut:

⁹ Dian Indudewi, *Akuntansi Keuangan 1*, (Semarang: University Press, 2012), hlm. 11.

1. Bagi peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK pada usaha UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Labupaten Padang Lawas.
3. Bagi perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UD. SBHSP Sembako untuk menerapkan SAK sebagai acuan dalam mengelola piutang usaha yang ada pada UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan sistematika pembahasan Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun proposal dan skripsi selanjutnya, maka peneliti mengklasifikasikan ke dalam lima bab yaitu:

BAB I pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, bab ini berisi tentang masalah yang dihadapi berkaitan dengan judul penelitian yang dipilih, yaitu perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK studi kasus UD. SBHSP Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, yaitu pembahasan teori yang mendukung permasalahan yang akan dikaji, dan berisi tentang penelitian terdahulu yaitu mengenai penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dari masalah yang diteliti dengan penelitian lain.

BAB III metode penelitian berisikan tentang metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. yang terdiri dari temuan umum, temuan khusus, analisis hasil penelitian, dan keterbatasan hasil penelitian.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan.¹ Adapun beberapa ahli mengemukakan pengertian dari akuntansi yaitu:

1) Menurut AICPA (*American Institute Certified Public Accountant*)

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.²

2) Menurut APB (*Accounting Principle Board*)

Akuntansi merupakan suatu aktifitas jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat

¹ Suradi, *Akuntansi: Pengantar 1*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 2

² Elly Suhayati, Sri Dewi Anggadini, *Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1-2.

keputusan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.³

3) Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

“Akuntansi adalah aktifitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik dan membuat pilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang ada.”⁴

4) Menurut Al-Haryono jusup “Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.⁵

5) Suwarjono mendefinisikan bahwa “Akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan”.⁶

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dari kegiatan bisnis dalam arti sempit, akuntansi adalah dapat dipandang sebagai suatu

³ Irmah Halimah Bachtiar, Nurfadila, *Akuntansi Dasar Buku Pintar untuk Pemula*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 3.

⁴ Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah Sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), hlm. 12.

⁵ Al-Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi Jilid Satu, Edisi ke Tujuh*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2011). hlm. 4.

⁶ Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi 1, Pendekatan Siklus Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2012). hlm. 4.

proses atau kegiatan yang meliputi pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi akuntansi suatu organisasi yang memiliki staf personel yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestigasian, dan pengambilan keputusan operasional.⁷

b. Akuntansi dalam Perspektif Islam

Akuntansi syariah dapat didefinisikan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Sedangkan definisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Dari pengertian akuntansi dan syariah di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.⁸

Akuntansi syariah merupakan teori ilmu pengetahuan profetik yang memiliki prinsip filosofis tertentu, yang kemudian dari prinsip filosofis kemudian diturunkan menjadi konsep dasar teori akuntansi syariah.

⁷ Arfan Ikhsan, et, al, *Teori Akuntansi*, (Bandung: Madenatera dan Citapustaka, 2013). hlm. 44.

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.8.

Disebutkan ilmu profetik maksudnya ilmu sosial profetik yaitu ilmu yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normatif dengan praktik. Dengan ilmu ini, perintah-perintah normatif menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.⁹

Secara normatif, masyarakat Muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal yang berarti bahwa pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar, adil, dan jujur. Substansi ini berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian substansi ini selalu diikuti dengan bentuk. Bentuk selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang dimaksud dengan bentuk disini adalah teknik dan prosedur akuntansi, perlakuan akuntansi, bentuk laporan keuangan, dan lain-lain.

⁹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 318.

c. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi-asumsi menyediakan fondasi untuk mengembangkan pedoman bagaimana seharusnya akuntan, mengukur, memproses dan mengomunikasikan informasi keuangan. Pedoman ini di Indonesia telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

- 1) Dasar Akrua (*accrual*), dengan data ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat uang/kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.
- 2) Dasar kelangsungan usaha (*the going concern*), dengan dasar ini laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud membubarkan diri atau mengurangi secara material skala usahanya.
- 3) Asumsi satuan moneter yang stabil (*the stable monetary unit*) mempersyaratkan bahwa hanya transaksi-transaksi yang dapat dinyatakan/diukur dengan uang yang termasuk dalam catatan akuntansi. Transaksi-transaksi dicatat dengan satuan uang (rupiah) yang stabil dan mengabaikan pengaruh inflasi.

4) Asumsi kesatuan ekonomi (*economic entity*). Kesatuan ekonomi dapat berupa organisasi atau unit-unit di masyarakat. Mungkin berupa organisasi perusahaan, unit-unit di masyarakat. Mungkin berupa organisasi perusahaan, unit-unit pemerintah, organisasi sekolah, dan organisasi dasar. Kesatuan ekonomi menyatakan bahwa kejadian ekonomi dapat diidentifikasi untuk pertanggungjawaban tertentu. Asumsi ini mensyaratkan bahwa aktivitas dari suatu kesatuan ekonomi harus dipisahkan dengan aktivitas pribadi pemilik kesatuan ekonomi tersebut.¹⁰

d. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah tahap-tahapan mulai dari transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan siap untuk pencatatan berikutnya. Siklus akuntansi dimulai dari bagaimana transaksi dicatat, bagaimana umumnya akun-akun pada jurnal, bagaimana akun dinilai serta menyajikannya dalam laporan keuangan dan kembali pencatatan transaksi berikutnya seperti tahapan sebelumnya. Siklus akuntansi berbeda dengan proses akuntansi.

Proses akuntansi adalah kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian laporan keuangan.¹¹ Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi

¹⁰ Hasibuan Abdul Nasser, dkk, *Belajar Mudah Akuntansi*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 12.

¹¹ Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS edisi ke III*, (Yogyakarta: Andi, 2016). hlm. 53.

pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, yaitu penjurnalan transaksi dan pemindahbukuan ke dalam buku besar dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode, pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode juga mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode berikutnya. Banyaknya langkah yang harus dilakukan pada akhir periode secara langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada akhir.

e. Metode Pencatatan Akuntansi

Ada dua pendekatan dasar akuntansi. Kedua pendekatan adalah basis aktual dan basis kas, perbedaan diantara kedua metode tersebut bagaimana dan kapan pendapatan penjualan dan biaya-biaya diketahui. Pendekatan pertama, basis kas dari akuntansi diketahui merupakan arus masuk dari pendapatan penjualan ketika kas diterima dan arus kas keluar biaya operasi untuk memperoleh pendapatan penjualan, ketika kas dibayar hanya menempatkan basis kas mengenali pendapata penjualan dan biaya operasi. Ketika kas berubah di tangan. Pendekata kedua, basis aktual, dari akuntansi merupakan arus masuk dari pendapatan penjualan ketika laba arus kas keluar dari biaya operasi untuk menghasilkan pendapatan penjualan ketika terjadi penjualan tidak ada masalah kapan kas diterima atau dibayar.

f. Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Ada beberapa tujuan akuntansi, diantaranya adalah:¹²

1) Tujuan Akuntansi Secara Umum

- a) Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun passiva perusahaan.
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi (netto) perusahaan.
- c) Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan.
- d) Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal.
- e) Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut.

¹² M. Prawiro, Pengertian Akuntansi, Memahami Apa itu Akuntansi, Tujuan, Fungsi, dan Manfaatnya, Diunduh Pada Tanggal 12 Juni 2022.

2) Tujuan Akuntansi Secara Khusus

Adapun tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai *Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)* atau *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

3) Tujuan Akuntansi Secara Kualitatif

- a) Memberikan informasi yang relevan.
- b) Menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya.
- c) Informasi yang disampaikan dapat di mengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan.
- e) Memberikan informasi transaksi yang *real time*, atau sesegera mungkin.
- f) Informasi yang disampaikan sesuai dengan PABU dan dapat diperbandingkan.
- g) Penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan.

2. Piutang

a. Pengertian Piutang

Piutang yaitu tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang perlunasannya jangka pendek.¹³ Piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain akibat kejadian di waktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktivas non kas lainnya yang harus dilakukan penagih (*collect*) pada tanggal jatuh temponya.¹⁴ Piutang mencakup semua tagihan dan bentuk uang kepada perseorangan, badan usaha atau pihak tertagih lainnya. Artinya pihak lain yang berhutang kepada perusahaan.

Sebagian besar jumlah piutang timbul dari umumnya dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Sebagian lain timbul dari pinjaman yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Piutang sebagai hak perusahaan untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain terselesaikan jika pihak yang berhutang melunasi hutangnya kepada perusahaan dengan mentransper barang atau jasa.¹⁵ Menurut Al Haryono Jusup “ piutang merupakan tagihan sipenjual kepada sipe mbeli sebesar

¹³ Elizar Sinambela, *et al*, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Manufaktur Teori, Soal-Soal, dan Praktikum*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 357.

¹⁴ Ryfan Racel Rompas, dkk, “Analisis Pengelolaan Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 3, 2018, hlm. 285-293.

¹⁵ Michell Suharli, *Akutansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm.201-202.

nilai transaksi penjualan, piutang juga timbul apabila perusahaan memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain”.¹⁶

Piutang usaha adalah penjualan barang atau jasa secara kredit yang dihasilkan perusahaan. Piutang usaha umumnya di klasifikasi sebagai aset lancar, kadang-kadang di sebut dengan piutang dagang (*Trade Receivable*) debitor atau piutang. Akun piutang usaha dalam buku besar berperan sebagai akun pengendalian (*Control Account*) yang mengikhtisarkan kas ketika jumlah total piutang dari semua pelanggan.¹⁷

Piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan secara kredit. Jatuh tempo piutang usaha biasanya berkisar 30 sampai 60 hari. Piutang usaha atau disebut juga piutang dagang adalah bagian dari aset keuangan.¹⁸

Semua perusahaan pada dasarnya berusaha dibidang penjualan barang atau jasa, meskipun beberapa penjualan dilakukan secara tunai, sebagian besar dapat dilakukan dengan penjualan kredit, maka hal tersebut akan menambah piutang perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya

¹⁶ Al Haryono Jusup, *Dasat-Dasar Akuntansi, Buku Dua, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, 2014), hlm. 71.

¹⁷ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 122.

¹⁸ Andrey Hasiholan Pulungan, *dkk, Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK per Juni 2012*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 145.

manager suatu perusahaan untuk mengelola piutangnya bergantung pada seberapa besar penjualan yang dilakukan secara kredit.¹⁹

b. Piutang dalam Perspektif Syariah

Secara etimologi, qardh berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qarad) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).

Sayid Sabiq memberikan defenisi qardh sebagai berikut.

“Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

Hanabilah sebagai dikutip oleh Ali Fikri memberikan defenisi qardh sebagai berikut:

“Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat diambil intisari bahwa qardh adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama, baik hanafiah dalam defenisi yang pertama, maupun hanabilah, keduanya memandang bahwa qardh

¹⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta, 2010), hlm. 314.

diartikan sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh, yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Disamping itu, dari defenisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa qard juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qard diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal atau harta) yang diberikan itu.

Al-Qardhu (memberikan utang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhannya.

c. **Klasifikasi Piutang**

Klasifikasi piutang atau penggolongan memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya penggolongan atau pengelompokkan tersebut akan membawa pembaca laporan keuangan lebih memahami unsur-unsur yang disajikan dalam neraca. piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi:²⁰

- 1) Piutang usaha adalah jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan.

Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60

²⁰ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: CPAS, 2013), hlm. 181.

hari. Secara umum jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan.

- 2) Wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai dengan 90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang.
- 3) Piutang lain-lain mencakup selain piutang usaha. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagih lebih dari satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak dan piutang karyawan.

Menurut PSAK dalam penelitian muhammad roosdianto piutang dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Piutang usaha, meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau menyerahkan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
- 2) Piutang lain-lain, meliputi piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan normal perusahaan.

3) Piutang yang diperkuat dengan promes disebut dengan wesel.²¹

d. Piutang Tak Tertagih

Sebagaimana digambarkan oleh salah satu akuntan terkemuka, imajinasi manajer kredit tentang surga adalah tempat di mana semua orang akhirnya membayar utangnya. Tetapi situasi ini seringkali tidak terjadi. Misalnya, pelanggan mungkin tidak mampu membayar karena penurunan pendapatan penjualan yang dialaminya. Demikian pula, seorang individu mungkin pula diberhentikan dari pekerjaan atau rumah sakit yang tidak terduga. Perusahaan mencatat kerugian kredit sebagai debit pada beban piutang tak tertagih. Kerugian tersebut adalah resiko yang normal dan diperlukan dalam melakukan bisnis secara kredit. Ada dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih yaitu:

1) Metode Penghapusan Langsung Untuk Piutang Tak Tertagih (*Direct Write Off Method*)

Ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada beban piutang tak tertagih. Asumsikan. Misalnya, bahwa pada 10 desember cruz co. Menghapus piutang dari saldo piutang yusado sebesar Rp 8.000.

²¹ Muhammad Roosdiant, "Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Pada CV. Hana Sejati Group Banjarmasin," *Jurnal KINDAI*, Vol. 10, No. 3, 2014, hlm. 25.

jurnal piutang tak tertagih metode penghapusan langsung adalah sebagai berikut:

Tgl/bulan	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
10 desember	Beban piutang tak tertagih Piutang		8.000	8.000

Dengan metode ini. Beban piutang tidak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari piutang tak tertagih. Perusahaan akan melaporkan piutang sebesar jumlah brutonya. Pendukung metode penghapusan langsung (yang sering digunakan untuk keperluan pajak) berpendapat bahwa metode ini mencatat fakta, bukan estimasi. Metode ini mengasumsikan bahwa piutang yang baik dihasilkan dari setiap penjualan, dan bahwa peristiwa kemudian menyebabkan piutang tertentu menjadi tidak dapat tertagih dan tidak berharga. Metode ini juga tidak membuat piutang dalam laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar sebesar nilai realisasi kasnya. Akibatnya, penggunaan metode penghapusan langsung tidak dianggap tepat, kecuali jika jumlah tertagih tidak material.²²

²² Donald E. Kieso, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting Volume 1 Edisi IFRS*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 427-428.

2) Metode Penyisihan Untuk Piutang Tak Tertagih

Metode penyisihan (*allowance method*) akuntansi untuk piutang tidak tertagih melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir periode. Metode ini menawarkan kondisi pengaitan yang lebih baik pada laporan laba rugi. Metode ini juga menjamin bahwa piutang perusahaan dicatat pada laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi kasnya. Dengan demikian, metode ini mengurangi piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang diperkirakan tidak tertagih.

Mencatat estimasi piutang tidak tertagih. Untuk megilustrasikan metode penyisihan, asumsikan bahwa brown furniture memiliki penjualan kredit sebesar Rp 1.800.000 pada tahun 2011. Dari jumlah ini, sebesar Rp 150.000 masih belum tertagih pada 31 desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa Rp 10.000 penjualan tersebut tidak akan tertagih.

Jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tgl/bulan	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
31 desember	Beban piutang tidak tertagih		10.000	
	Penyisihan piutang tak tertagih			10.000

Brown melaporkan beban piutang tidak tertagih dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi. Dengan demikian, estimasi piutang tidak tertagih dikaitkan dengan penjualan pada tahun 2011. Brown mencatat beban tersebut pada tahun yang sama dengan penjualan. Untuk penghapusan piutang, asumsikan mengotorisasi penghapusan sebesar Rp 1.000 saldo piutang yang harus dibayar pada tanggal 1 Maret 2012.

Jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah:

Tgl/bulan	Keterangan	ref	Debet	Kredit
1 Maret	Penyisihan piutang tak tertagih		1.000	
	Piutang			1.000

Pemulihan piutang tak tertagih, kadang-kadang. Perusahaan pada akhirnya berhasil menagih dari pelanggan setelah perusahaan telah menghapuskan piutang tersebut sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat dua jurnal untuk mencatat pemulihan piutang tak tertagih, membalikkan jurnal yang menghapuskan piutang tersebut.

Jurnal memunculkan kembali piutang pelanggan dan menjurnal penagihan dengan cara biasa. Jurnalnya yaitu:

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Piutang usaha		xxx	
Penyisihan piutang tak tertagih			xxx
Kas		xxx	
Piutang usaha			xxx

Perhatikan bahwa pemulihan piutang piutang tak tertagih, seperti juga penghapusan piutang tak tertagih, hanya memengaruhi akun pada laporan posisi keuangan. Dampak neto dari dua jurnal tersebut adalah debit ke kas dan kredit ke penyisihan piutang tak tertagih.²³

3. Transaksi dan Bukti Transaksi

a. Pengertian Transaksi dan Bukti Transaksi

Transaksi adalah seluruh kegiatan atau suatu kondisi dalam perusahaan yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, utang, dan modal perusahaan, sehingga harus diproses melalui pencatatan sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yang disebut dengan bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi yang ada kemudian melalui proses pencatatan atau penjurnalan ke dalam buku jurnal.

²³ *Ibid*, hlm. 429-430.

Bukti transaksi adalah tanda, catatan, atau keterangan singkat secara tertulis tentang transaksi atau peristiwa keuangan yang berisi jenis transaksi, nilai uang transaksi, serta pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Bukti transaksi merupakan sebuah dokumen penting bagi setiap organisasi ataupun perusahaan yang melakukan sebuah transaksi. Bukti transaksi berfungsi sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi, transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan pada umumnya meliputi:

- 1) Penerimaan uang tunai dan barang dari pemilik sebagai setoran modal.
- 2) Pembelian perlengkapan dan peralatan secara tunai atau kredit.
- 3) Pembayaran uang pada kreditur.
- 4) Penjualan jasa atau barang secara tunai atau secara kredit.
- 5) Penerimaan taguihan dari debitur.
- 6) Pembayaran beban-beban.

Transaksi-transaksi tersebut merupakan kejadian-kejadian dalam perusahaan yang harus dicatat. Adapun kondisi atau keadaan yang merupakan transaksi perusahaan antara lain:

- 1) Berkurangnya nilai persediaan barang karena susut atau sebagian rusak;
- 2) Penurunan nilai harta tetap (penyusutan); dan
- 3) Adanya penghasilan yang masih harus diterima atau adanya beban yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi.²⁴

b. Fungsi Bukti Transaksi

Transaksi merupakan semua peristiwa-peristiwa yang bernilai uang yang ada hubungannya dengan atau hutang atau modal perusahaan tersebut, dan biasanya transaksi itu dibuktikan dengan adanya dokumen. Fungsinya yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang terkecil maupun besar setiap harinya dalam perusahaan, seperti penjualan, pembelian, dan lain-lain, mengenai transaksi yang berhubungan dengan biaya, misalnya:

- 1) Pembelian dibuktikan dengan faktur pembelian.
- 2) Pembayaran dibuktikan dengan faktur pembayaran.
- 3) Penjualan dibuktikan dengan faktur penjualan.
- 4) Pengiriman barang dibuktikan dengan faktur pengiriman barang.

Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara

²⁴ Widana Nur Ardhiyanto, *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 31-32.

akuntansi. informasi yang dapat diperoleh dari adanya bukti transaksi, yaitu:

- 1) Siapa yang melakukan transaksi.
- 2) Rekening apa saja terpengaruh dengan adanya transaksi yang terjadi.
- 3) Penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan selanjutnya (jurnal).

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menganalisis sebuah bukti transaksi, diantaranya yaitu:

- 1) Identifikasi keabsahan fisik bukti transaksi, artinya menentukan pihak mana yang mengeluarkan (*intern* atau *ekstern*) serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan.
- 2) Identifikasi transaksi dan meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan meneliti tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan.
- 3) Menentukan kebenaran perhitungan nilai uang yaitu dengan meneliti perhitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Menentukan akun-akun besar dan jumlah rupiah yang harus di debet dan di kredit sebagai akibat terjadinya transaksi.

c. Jenis-Jenis Bukti Transaksi

Di dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan. Akuntansi perusahaan dinyatakan baik apabila semua bukti pendukung pencatatannya memadai dan pencatatan dilakukan sebagaimana mestinya. Bukti-bukti transaksi harus disimpan dengan baik di dalam almari arsip agar memudahkan pencariannya kembali. Untuk memudahkan pencariannya, arsip tersebut disimpan dengan berbagai cara antara lain:²⁵

- 1) Menurut urutan tanggalnya (kronologis).
- 2) Menurut urutan nomornya.

Dalam tahap pencatatan, dokumen sumber (bukti transaksi) ditinjau dari segi si pembuatnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bukti *intern* yaitu bukti (dokumen) yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri.
- 2) Bukti *ekstern* yaitu bukti (dokumen) yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak di luar perusahaan.

²⁵ Arfan Ikhsan, et. al, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung:Citapustaka Media, 2014), hlm. 229.

Dalam hal bukti transaksi piutang dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah:

- 1) Faktur Penjualan, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang atas dasar transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat (*bill of loading*) dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit.
- 2) Bukti Kas Masuk, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur.
- 3) Memo Kredit, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan
- 4) Bukti Memorial (*Journal Voucher*), bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi kedalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi.

Selain dokumen pokok tersebut ada juga beberapa Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang seperti:

- 1) Jurnal Penjualan dimana catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit.
- 2) Jurnal Retur Penjualan dimana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan.
- 3) Jurnal Penerimaan Kas dimana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur.
- 4) Kartu Piutang yaitu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur.

4. Akuntansi Piutang Usaha

a. Dasar hukum Akuntansi Piutang Usaha

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur-an, sunah nabawiyyah, ijma' (keepakatan para ulama), qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah mu'amalah, yang pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal manusia. Akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara-cara tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang atas segala transaksi dan kejadian yang kemudian dilakukan penafsiran terhadap hasil ikhtisar tersebut, sehingga dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan penilaian dan pengambil keputusan. Pencatatan transaksi sebagai suatu aktifitas

akuntansi.²⁶ Masalah yang terkait dalam piutang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا

²⁶ Delima Sari Lubis, "Eksistensi Akuntansi dalam Islam," *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 75-77.

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^م

بِكُمْ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ^ص وَيَعْلَمْكُمْ^ق اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ت

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).²⁷

Berdasarkan surah diatas, Allah telah memberi perintah kepada orang-orang beriman agar melakukan pencatatan atas transaksi mu’amalah yang tidak tunai, termasuk transaksi jual beli, utang piutang

²⁷ Al-Qur’an Al-Karim, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 37.

dan sewa-menyewa, pencatatan transaksi tersebut bertujuan untuk terciptanya kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan mu'amalah, yang dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan istilah *accountability*. Pencatatan atas suatu transaksi tentu dilakukan oleh seorang juru tulis yang harus jujur dan adil. Oleh karena itu, ayat diatas juga mengisyaratkan perlu adanya seorang akuntan. Sementara itu, untuk transaksi yang tunai diperbolehkan tidak dilakukan pencatatan, jika memang tidak diperlukan adanya pembuktian di kemudian hari. Namun untuk mengantisipasi adanya perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, maka seluruh transaksi perlu dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.²⁸

Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga dengan adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti, menggunakan saksi sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, bon, kwitansi, atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, dengan adanya sistim pelaporan yang komprehensif

²⁸ Saparuddin Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

akan memperkuat manajemen karena transaksi dapat dikelola dengan baik.

b. Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha

Menurut Suwardjono, perlakuan akuntansi adalah “tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan pengukuran/penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*)”.

1) Pengakuan Piutang

Pengakuan didefinisikan sebagai suatu cara untuk melaporkan informasi keuangan dengan menyatakan semua penilaian atau estimasi dan kemudian digunakan untuk membuat jurnal, pengakuan komponen tertentu didasari pada empat kriteria yaitu definisi keterukuran, relevansi dan penyajian yang jujur, akun yang akan diakui harus memenuhi definisi elemen yang ada dalam memenuhi karakteristik dapat diukur dengan reliabilitas yang memadai, relevan dalam pengambilan keputusan dan di presentasikan secara jujur.

2) Pengukuran Piutang

Pengukuran didefinisikan sebagai proses pemberian angka atau nilai kepada suatu objek atau kejadian sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengukuran merupakan proses menetapkan jumlah uang yang diakui dan dimasukkan dalam laporan

keuangan. Beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan secara kombinasi untuk akun-akun dalam laporan keuangan yaitu:

- a) Biaya historis (*Historical Cost*);
- b) Biaya kini (*Current Cost*);
- c) Nilai realisasi bersih (*Net realizable value/ Net settlement value*);
- d) Nilai sekarang yang terdiskonto/ *Present value discounted*.²⁹

Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang dan harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang usaha dan piutang wesel. Karena keduanya sering dijumpai dalam suatu perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. Dengan adanya pengukuran piutang tersebut, maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang yang bersangkutan..

3) Pencatatan Piutang

Piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto (nilai jatuh tempo) dikurangi dengan taksiran jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Karena itu berkaitan dengan pengelolaan piutang, perusahaan harus membuat suatu cadangan piutang tak tertagih yang merupakan

²⁹ Ernawati Budi Astuti, dkk, *Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 28.

taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam periode tersebut.

4) Penyajian Piutang

Berikut penyajian piutang usaha pada neraca:

- a) Piutang usaha harus disajikan dineraca sebesar jumlah bruto.
- b) Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih (netto).
- c) Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca.
- d) Piutang usaha yang bersaldo kredit terdapat di dalam kartu kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar.
- e) Jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha.³⁰

5) Pengungkapan Piutang

Pengungkapan merupakan penyampaian elemen-elemen informasi akuntansi yang sangat penting kepada pihak yang berkepentingan. Pengungkapan yang memadai disajikan dalam

³⁰ Yudi Rahman, Eka Nurliani, "Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang pada CV. Rizky Saputra Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 7, No. 1, Maret 2021, hlm. 041-061.

catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan adalah untuk mendeskripsikan elemen yang diakui dengan penyajian pengukuran yang relevan. Tujuan kedua adalah menggambarkan elemen yang tidak diakui dengan pengukuran yang berguna. Sementara tujuan ketiga adalah membantu investor dan kreditur memperkirakan potensi dan risiko yang akan dihadapi atas elemen yang tidak diakui, serta memberikan informasi yang dibutuhkan.

Pengungkapan informasi piutang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi jenis piutang, jumlah piutang dan pihak-pihak yang berkaitan dengan piutang.

5. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. Dengan adanya Standar akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Di dunia ada 2 standar yang dijadikan referensi yaitu *International Financial Reporting Standard (IFRS)* dan *US Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP)*. IFRS disusun oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* sedangkan US-GAAP disusun oleh *Financial Accounting Standar Board (FASB)*.

Di Indonesia, Efektif per 1 Januari 2015 secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Dengan perbedaan yang semakin sedikit antara SAK dan IFRS maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Reporting Standard (PSAK) adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021.³¹

Standar akuntansi merupakan barometer suatu pijakan dalam penyusunan laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti oleh semua unsur pemakai dari yang dihasilkan oleh akuntansi dan standar yang digunakan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Standar ini diadopsi dari *internasional financial reporting standar* (IFRS) melalui IAI, telah menetapkan dan melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012. Proses

³¹ Hasibuan, Renika, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah*, cetakan pertama (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023) hlm. 8-9.

adopsi ini sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang ada, penambahan dan pengurangan dari IFRS dituang dalam PSAK tersendiri sehingga dengan cepat dapat mengetahui perbedaan IFRS dan PSAK.³²

Sedangkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) dipergunakan bagi entitas yang akuntabilitasnya publiknya tidak terlalu bagus sedangkan laporan keuangannya hanya ditujukan untuk tujuan umum pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan.³³

Tujuan Standar Akuntansi Keuangan adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam standar akuntansi terkait.³⁴

6. Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Perkembangan transaksi dan entitas yang sangat pesat, maka diperlukan upaya menyusun seperangkat standar akuntansi syariah. Dewan standar

³² Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 9.

³³ Munawar, dkk, *Teori dan Aplikasi Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2021), hlm. 8.

³⁴ Suhendar, dkk, *Pengantar Akuntansi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Adab CV. Adanu Abimata, 2020, hlm. 5.

akuntansi keuangan IAI atas persetujuan badan pelaksana harian dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia telah menyusun secara khusus kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sejak tahun 2009, dewan pimpinan nasional IAI membentuk dewan standar akuntansi syariah yang terpisah dari dewan standar akuntansi keuangan.

Standar akuntansi keuangan syariah (SAS) adalah Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syariah.

Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah adalah transaksi-transaksi syariah yang berlaku untuk para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru', sukuk, zakat, serta wakaf.

Standar akuntansi syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi piutang usaha yaitu akad *salam*. Menurut jumhur ulama akad atau transaksi *salam* adalah jual beli barang pesanan (inden) dengan sifat spesifikasi tertentu dalam tanggungan penjual dengan cara pembayarannya

tunai pada saat (di majlis) akad. Menurut Standar Akuntansi Syariah atau PSAK No. 103 mengenai perlakuan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran bagi penjual dan pembeli. Dan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum laporan keuangan untuk entitas syariah. PSAK No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Komponen laporan keuangan syariah yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 103)

Perlakuan akuntansi transaksi Bai' *As-salam* berdasarkan PSAK No. 103 Tahun 2016).

a. Perlakuan akuntansi bagi pembeli

PSAK No. 103 Tahun 2016 dimaksudkan untuk entitas (baik sebagai penjual atau pembeli) yang melakukan transaksi *salam*. Perlakuan akuntansi bagi pembeli lebih dulu dibahas karena aliran ekonomi (kas) pertama kali mengalir dari pembeli.

1) Pengakuan dan pengukuran piutang salam

Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual atau modal usaha *salam* disajikan sebagai piutang *salam*. Modal *salam* dapat berupa kas dan non kas. Modal usaha *salam* berupa kas diukur sebesar jumlah kas yang dibayarkan. Sedangkan, modal usaha *salam* non kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian saat penyerahan modal.

2) Penyajian *salam*

Salam disajikan oleh pembeli sebagai piutang *salam*. Persediaan (aset *salam*) diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Bila nilai realisasi neto < dari biaya perolehan, selisihnya diakui kerugian.

3) Pengungkapan *salam*

- a) Besarnya modal usaha *salam*, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain,
 - b) Jenis dan kuantitas barang pesanan, dan
 - c) Pengungkapan lain sesuai PSAK No. 101.
- b. Perlakuan akuntansi bagi penjual
- 1) Pengakuan dan pengukuran *salam*

Kewajiban *salam* diakui pada saat penjual menerima modal usaha *salam* dan modal usaha *salam* bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, bentuk non kas diukur sebesar nilai wajar.

Contoh BMT Barokah menyepakati akad *salam* dengan Mitratani MT 27 atas kedelai Edamame Biosoy 1 (kadar air 10%) sebanyak 1 ton dengan harga Rp.200.000.000,-. Mitratani MT 27 menerima modal *salam* (kas Rp.100.000.000,-, dan mesin bajak, nilai wajar Rp.100.000.000,-, nilai tercatat Rp.100.000.000,

Uraian	Debet	Kredit
Kas	100.000.000	
Aset non kas (mesin bajak, nilai wajar)	100.000.000	200.000.000
Hutang <i>salam</i>		

2) Penyajian *salam*

Dalam penyajian transaksi *salam*, penjual menyajikan modal usaha *salam* yang diterima sebagai kewajiban *salam*.

3) Pengungkapan *salam*

Penjual mengungkapkan transaksi *salam*:

- a) Piutang *salam* kepada produsen, dalam *salam* paralel yang memiliki hubungan yang istimewa.
- b) Jenis dan kuantitas barang pesanan
- c) Pengungkapan lain sesuai PSAK No. 101.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 101) tentang penyajian laporan keuangan.

Pertimbangan menyeluruh dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah yaitu:

a. Penyajian secara wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan Yang diharuskan Pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi

Manajemen memilih dan menerapkan kebijakna akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, maka manajemen harus menetapkan kabijakan untuk memastika bahwa laporan keuangan menyajikan informasi.

1) Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan

2) Dapat diandalkan, dengan pengertian.

- a) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dari posisi keuangan entitas syariah.
 - b) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
 - c) Netral yaitu bebas dari keberpihakan.
 - d) Mencerminkan kehati-hatian.
 - e) Mencakup semua hal yang material.
- c. Kelangsungan usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuiditas atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.

Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

d. Dasar AkruaI

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akruaI, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

e. Konsisten penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa.
- 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan atau interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan.

f. Materialitas dan agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

g. Saling hapus (*offsetting*)

Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan.

Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.

h. Informasi komparatif

Informasi komparatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, menyajikan dua bagian pokok yaitu aktiva (assets) dan passiva

(liabilities and capital). Yang dimaksud dengan aktiva adalah jumlah harta/ kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan passiva adalah jumlah kewajiban-kewajiban perusahaan atau sumber yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut.

Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah sebagai berikut:

a) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan atas diperoleh entitas syariah.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

c) Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

d) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.

Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam standar akuntansi keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

1) Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut.

- a) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah.
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.
- c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2) Kewajiban jangka pendek

Selain kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika

- a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah.
- b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Informasi yang disajikan dalam neraca menurut PSAK No. 101 menyatakan bahwa neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Aset keuangan
- 3) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 4) Persediaan
- 5) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- 6) Aset tetap
- 7) Aset tak berwujud

- 8) Hutang usaha dan hutang lainnya
- 9) Hutang pajak
- 10) Dana syirkah temporer
- 11) hak minoritas
- 12) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

2). Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih, jika dikurangkan selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi laba (untung). Namun jika sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi rugi. Komponen lainnya yang ada di dalam laporan laba rugi adalah pajak dan laba perlembar saham.

Menurut PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian

secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) Pendapatan usaha
- b) Bagi hasil untuk pemilik dana
- c) Beban usaha
- d) Laba atau rugi usaha
- e) Pendapatan dan beban non usaha
- f) Laba atau rugi dari aktivitas normal
- g) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

Jika terdapat pendapatan non halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

3). Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan dalam akuntansi yang menggambarkan bertambahnya atau berkurangnya modal suatu perusahaan akibat dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan

ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait.
- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- f) Rekonsialisasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diakui dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang

bersal dari transaksi dengan kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.

4). Laporan arus kas.

Dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Laporan ini menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas sebagai berikut:

- a) Sumber dan penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional arus kas untuk kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa tertentu. Perubahan di dalam arus kas operasi biasanya memberikan tanda bahwa akan ada perubahan dalam laba bersih perusahaan dimasa mendatang.

Semakin tinggi peningkatan arus kas bersihnya, semakin bagus.

- b) Sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi, sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang ekuitas seperti peralatan baru, mobil, komputer, dan mesin baru. Kegiatan investasi juga mencakup akuisisi bisnis lainnya atau investasi dalam berbagai instrumen investasi, misalnya pembelian saham atau obligasi perusahaan lain untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan atau pada saat ini adalah kegiatan perusahaan memasukkan kas dalam reksadana.
- c) Sumber dan penggunaan kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengambilan dana dari pemegang saham, calon pemegang saham dan pihak kreditur. Arus kas masuk dari kegiatan pendanaan biasanya terdiri dari hasil penjualan saham, obligasi, atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar pada kegiatan pendanaan adalah pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembayaran deviden.

5). Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan akan memberikan perincian dari jumlah total aktiva tetap yang disajikan perincian ini dalam bentuk penggolongan aktiva tetap berdasarkan nilai atau berdasarkan jenis-jenis aktiva tetap.

Catatan atas laporan keuangan juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dilakukan seperti misalnya metode penyusutan apa yang digunakan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap, berapa estimasi usia pakai aktiva tadi, dan lain sebagainya. Khusus untuk pendapatan atau aktiva bersih, catatan atas laporan keuangan memberikan gambaran mengenai retriksi atau pembatasan apa saja yang dikenakan kepada aktiva bersih serta jenis-jenis pembatasannya termasuk jangka waktu bila ada.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu terhadap perlakuan akuntansi piutang usaha banyak dilakukan di antaranya:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aprilia V. Manuel, Hendrik Manosoh dan Dhullah. (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2, 2017). ³⁵	Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT. Sucopindo (Persero) cabang Jakarta	Dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang PT. Sucopindo (Persero) cabang jakarta telah mengakui dan mengukur piutang sesuai dengan sak yang berlaku. Di dalam penyajian dan pengungkapan piutang dapat dikatakan bahwa PT. Sucopindo (Persero) cabang Jakarta tidak sesuai dengan sak yang berlaku.
2.	Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy, Melly Kalalo (Jurnal Riset Going Concern, Vol. 12, No. 2, 2017) ³⁶	Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 atas Impairment Piutang Pada PT. Putra Karangatang	Bahwa penurunan nilai yang diakui dan dibuat oleh PT. Putra karangatang telah sesuai dengan psak no. 50 dan 55 revisi 2014 tentang penurunan nilai. PT. Putra karangatang menyatakan bahwa setiap akhir periode penurunan nilai diukur berdasarkan besarnya nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan. Hal ini sesuai dengan psak 50 dan 55 revisi 2014 yaitu pada setiap akhir periode perusahaan melakukan evaluasi individual dan terdapat bukti objektif bahwa memang benar piutang tersebut mengalami penurunan nilai. Pada laporan keuangan PT. Putra karangatang melakukan penyajian posisi nilai

³⁵ Aprilia V. Manuel, dkk, "Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT. Sucopindo (Persero) Cabang Jakarta", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 441-451.

³⁶ Ismie Iswara Akun, dkk, Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 Atas Impairment Piutang Pada PT. Putra Karangatang, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 1091-1101.

			piutang pada laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan psak 50 dan 55 revisi 2014. Karena perusahaan melakukan cara penyajian piutang pembiayaan dan cadangan penurunan nilai piutang pada laporan posisi keuangan.
3.	Nur Muhammad Asriadi, (Skripsi, Universitas Bosowo Makassar), 2020. ³⁷	Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Sparepart Pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar	Perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku meliputi pengakuan piutang, penilaian piutang, dan penyajian dan pengungkapan piutang sehingga dapat menunjang kewajaran nilai dalam laporan keuangan.
4.	Indah Permatasari Nasution (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021). ³⁸	Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) pada Usaha UD. Saudara Jaya di Kota Medan	UD. Saudara Jaya sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, belum seratus persen sesuai dengan sak yang berlaku. Dari segi pengakuan dan pencatatan UD. Saudara jaya sudah sesuai dengan PSAK NO. 23 revisi 2014 dan pencatatan sesuai dengan PSAK ETAP. Ditinjau dari segi pengukuran belum sesuai dengan PSAK NO.55 revisi 2014, penyajian dan pengungkapan piutang belum sesuai dengan PSAK ETAP dimana piutang yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih dan tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

³⁷ Nur Muhammad Asriadi, “ Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Sparepart pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar”, *Skripsi* Universitas Bosowa Makassar, 2020.

³⁸ Indah Permata Sari, “Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) pada Usaha UD. Saudara Jaya di Kota Medan, *Skripsi*, (Medan: UINSU, 2021), hlm. 1.

Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti, yaitu:

Penelitian V. Manuel, Hendrik Manossoh dan Dhullo Affandi meneliti tentang Analisis Perlakuan Piutang di PT. Sucopindo (Persero) Cabang Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlakuan piutang, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini adalah pada objek penelitian.

Penelitian Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy, Melly Kalalo meneliti tentang Analisis penerapan PSAK 50 dan 55 atas *impairment* piutang pada PT. Putra Karangerang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlakuan piutang, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian.

Penelitian Nur Muhammad Asriadi meneliti tentang Analisis perlakuan terhadap Spirespart pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlakuan piutang usaha, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian.

Penelitian Indah Permatasari Nasution, meneliti tentang perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK pada usaha UD. Saudara Jaya di Kota Medan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi piutang usaha, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada usaha dagang UD. SBHSP Sembako yang beralamat di Desa Huristak Kecamatan Pasar Huristak Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan dilapangan.¹Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. John w. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.²

Penelitian komparatif, penelitian ini berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel, atau beberapa variabel sekaligus, tujuan

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet, Ketiga*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

metode penelitian ini untuk melihat perbedaan dan atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perbandingan yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Perhitungan yang digunakan berupa persamaan dan perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta faktor pendukung hasil. Yang ditekankan dari hasil penelitian ini, yaitu bagaimana unsur pembentuk hasil penelitian dapat menjadi latar belakang dari hasil penelitian tersebut.³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Subjek penelitian adalah pelaku penting data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti UD. SBHSP Sembako serta sumber data penunjang yaitu perusahaan yang melakukan piutang kepada pembeli, pemilik usaha, dan karyawan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, sampel sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dipilih dengan mempertimbangkan dengan tujuan tertentu.⁴

Dalam hal pemilihan ini sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu, tidak ada kriteria baku mengenai berapa jumlah sampel yang akan diwawancarai,

³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 8.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 391.

peneliti berhenti mewawancarai sampai data menjadi jenuh. Sampel yang dijadikan sebagai sumber data atau informan adalah orang-orang yang tergolong masih terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti, memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi, menguasai dan memahami kegiatan yang sedang diteliti, serta dapat memberikan informasi yang akurat.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian atau yang harus difokuskan dalam penelitian serta yang menjadi sasaran dalam penelitian guna mendapatkan solusi dari permasalahan perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yaitu hasil wawancara pihak yang bersangkutan serta dokumen dan arsip-arsip perusahaan.
2. Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data sekunder dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu.⁵

⁵ Elfis F, Purba, Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Percerakan Sadia, 2012) Cet, 2, hlm. 106.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, Wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.⁶ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.⁸

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicara

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 42.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 136.

⁸ *Ibid*, hlm. 107.

dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebur. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi berupa data tertulis, foto, dan hasil rekaman wawancara dengan informan yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa prosedur pelaksanaan terhadap perlakuan akuntansi piutang usaha.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menguji keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui atau pun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada yang data dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis dari yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

4. Mengadakan *Member Check*

Teknik ini dilakukan dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian yang bertujuan agar data yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data tersebut atau informan.⁹

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif dan menarik kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan perbandingan antara fakta yang ada di perusahaan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan

⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 461-468.

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹⁰

¹⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UD. SBHSP Sembako

1. Sejarah Singkat UD. SBHSP Sembako

UD. SBHSP (Sutan Barita Hasibuan Parnapa) didirikan pada tahun 2012 yang berada di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Pasar Huristak, Kabupaten Padang Lawas. UD. SBHSP Sembako dibentuk atau didirikan oleh Bapak Arjun Hasibuan dan Ibu Nurbahagia Lubis. UD. SBHSP Sembako ini awalnya hanyalah pedagang kecil tapi lama kelamaan usaha ini berkembang menjadi pedagang besar atau disebut dengan grosir tepatnya pada tahun 2014 toko UD. SBHSP Sembako ini menjadi toko yang besar di daerah desa tersebut.¹

2. Lokasi dan Tata Letak Usaha UD. SBHSP Sembako

UD. SBHSP Sembako berada di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Lokasi usaha terletak didekat pasar dan didepan SD NEGERI 0902 BONGBONGAN dapat memberikan dari segi pemasaran untuk pemasarannya pun untuk diakses karena lokasinya strategis. Karena dilokasi tersebut tidak terdapat pedagang grosiran kemungkinan dari desa lain datang belanja ke toko UD. SBHSP Sembako tersebut.

¹ Wawancara dengan Bapak Arjun Hasibuan, selaku pemilik UD. SBHSP Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB.

3. Tujuan Usaha UD. SBHSP Sembako

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan sembako seperti: minyak, beras, rokok, sabun, makanan ringan, dan barang sembako lainnya.
- b. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk ke sekolah dan bekerja sama dengan koperasi di sekolah.

4. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi UD. SBHSP Sembako

Menjadikan perusahaan dagang yang berkembang di kalangan masyarakat

b. Misi UD. SBHSP Sembako

- 1) Meningkatkan nilai badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual.
- 2) Menjual barang dengan kuantitas yang bagus dengan harga yang terjangkau dan membina hubungan baik antara pelanggan dan penjual.

5. Kegiatan Operasional Usaha UD. SBHSP Sembako

UD. SBHSP Sembako merupakan perusahaan dengan golongan usaha perdagangan kecil yang berbentuk Usaha Dagang (UD) dengan spesifikasi bidang usaha penjualan barang-barang sembako. Struktur organisasi diperlukan dalam perusahaan untuk pemberian tempat atau sebagai kerangka agar orang mendapat tempat dan fungsi masing-masing untuk bekerja dan

melaksanakan tugasnya sebagai tujuan pokok yang telah digariskan oleh manajemen atau pimpinan, sehingga tanpa struktur organisasi yang baik maka tujuan perusahaan sulit untuk dicapai. Struktur organisasi bukanlah merupakan suatu tujuan perusahaan, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan membantu berhasilnya pencapaian tujuan perusahaan, dan berdasarkan alasan ini maka penyusunan struktur organisasi adalah sangat penting. Adapun struktur organisasi pada UD. SBHSP Sembako sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Struktur Organisasi UD. SBHSP Sembako

No.	Nama	Jabatan
1.	Arjun Hasibuan	Pemilik Usaha
2.	Nurbahagia Lubis	Istri Pemilik Usaha
3.	Putri	Karyawan

Sumber: Wawancara dengan Bapak Arjun Hasibuan, Selaku Pemilik UD. SBHSP Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Piutang Usaha

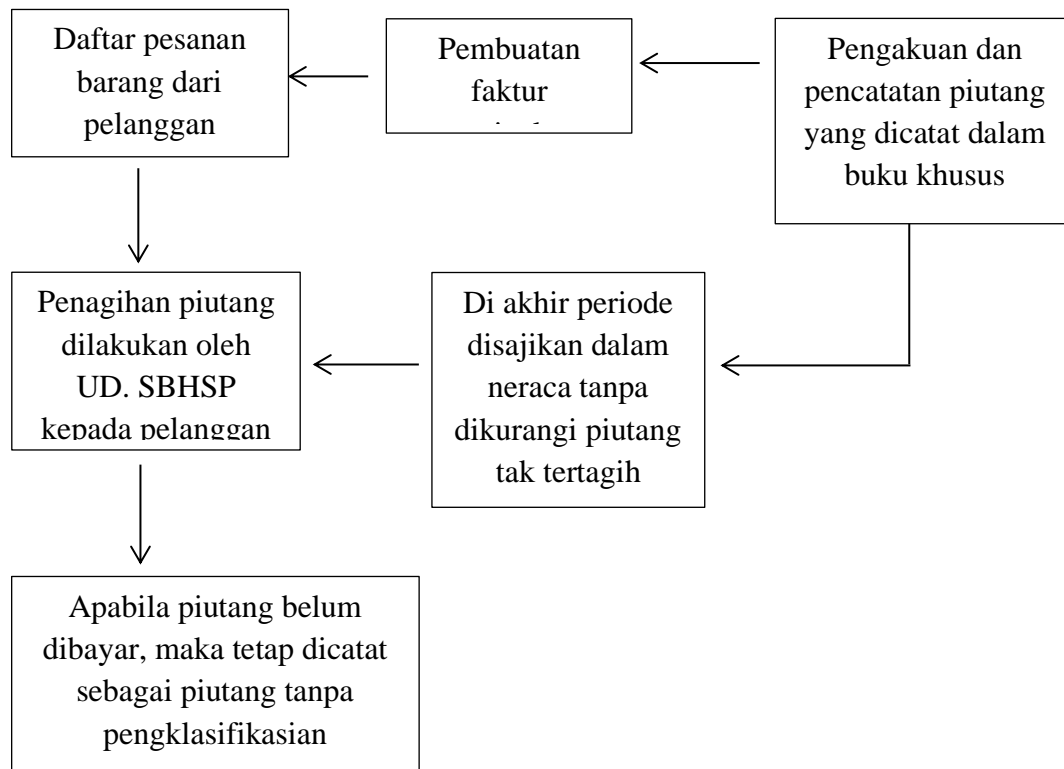
Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang pelanggan dan kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk yang berasal dari penegihan piutang tersebut. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Dalam keadaan yang normal, dimana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit. Piutang

mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada persediaan, karena perputaran piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja.

Piutang sebagai elemen modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Tinggi rendahnya berputaran piutang mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi perputarannya, semakin pendek waktu modal yang tertanam dalam piutang. Untuk mempertahankan tingkat penjualan kredit bersih tertentu. Dalam penjualan kredit, pengakuan penjualan tidak bersamaan waktunya dengan aliran masuk kas. Kas masuk yang terjadi karena penjualan kredit itu dapat direncanakan dengan menyusun anggaran pengumpulan piutang.

Perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD. SBHSP. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada usaha UD. SBHSP, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni, perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD. SBHSP yang diterapkan perusahaan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, perusahaan banyak melakukan kegiatan penjualan secara kredit yang selanjutnya menimbulkan piutang dengan menerbitkan faktur penjualan. Selanjutnya pembayaran atas faktur tersebut kemungkinan dicatat dalam catatan harian tetapi tidak dikelompokkan dalam umur yang sama misalnya diketahui secara jelas pencatatan kapan pembayaran yang akan jatuh tempo atas piutang tersebut.

Gambar IV.1
Alur Perlakuan Piutang pada UD. SBHSP Sembako



C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada UD. SBHSP Sembako

a) Pengakuan Piutang Usaha pada UD. SBHSP Sembako

Pengakuan piutang erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan, dimana pendapatan pada umumnya diakui dan dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan terealisasi. Dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi, dimana piutang diakui setelah barang selesai diberikan kepada pelanggan dan diterbitkan *invoice*, seperti pada tanggal 15 Maret 2020 perusahaan mengakui piutang sebesar Rp

9.250.000, pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000, dan pada tanggal 05 Februari 2022 perusahaan mengakui piutang sebesar Rp. 6.000.000.

Secara umum berdasarkan ketiga transaksi tersebut, perusahaan telah mengakui piutang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 103 yang menyatakan bahwa piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Karena sehubungan dengan transaksi diatas, piutang yang berasal dari penjualan jasa pada umumnya diakui pada saat jasa itu dilaksanakan dan diakui berdasarkan nilai tukar dari aset yang dijual antara pihak yang melakukan transaksi. Dimana nilai tukar ini adalah nilai yang akan dibayarkan oleh debitur pada saat yang telah ditentukan dan dibuktikan oleh bukti berupa dokumen yang disebut dengan faktur. Dengan demikian, dalam hal pengakuan piutang pada usaha UD. SBHSP telah mengakui piutang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

b) Pengukuran Piutang pada UD. SBHSP Sembako

Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang yang harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Dengan adanya pengukuran piutang, maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang. Pada UD. SBHSP Sembako, piutang diukur sebesar nilai wajar atau sebesar jumlah yang dapat direalisasikan dan dapat

diterima dalam bentuk kas. Dimana jumlah piutang yang diakui sebesar harga pertukaran (*exchange price*) atau kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pelanggan. Transaksi pada tanggal 15 maret 2020 perusahaan jumlah yang diakui piutang sebesar Rp 9.250.000, pada tanggal 10 agustus 2021 jumlah piutang yang diakui sebesar Rp. 10.000.000, dan pada tanggal 05 Februari 2022 perusahaan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp 6.000.000.

Kemudian untuk menentukan nilai realisasi bersih, UD. SBHSP mengestimasi piutang tak tertagih dengan menggunakan metode penyisihan atau cadangan. Dimana pada akhir periode pelaporan (tahunan), perusahaan menentukan besarnya taksiran piutang tak tertagih yang nantinya akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan.

Jumlah piutang untuk periode tahun 2020 yang dilaporkan perusahaan dalam laporan posisi keuangan sebesar Rp 10.500.000 yang merupakan jumlah setelah penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian pada periode 2021, jumlah piutang yang dilaporkan perusahaan sebesar Rp 5.000.000. jumlah ini juga merupakan jumlah setelah penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya pada periode 2022, jumlah piutang yang dilaporkan perusahaan sebesar Rp 6.250.000, yang merupakan jumlah setelah penyisihan piutang tak tertagih.

Berdasarkan pembahasan diatas, jika dikaitkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku PSAK No. 103 yang berkaitan juga dengan PSAK No. 68 menyatakan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima atau harga yang akan dibayar. Dimana piutang diukur dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas dimasa datang dan akuntansi mewajibkan pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih, hal tersebut dianggap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku karena untuk mengukur nilai aset atau liabilitas diizinkan mengukur atau mengungkapkan berdasarkan nilai wajar dan mewajibkan pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih. Dengan demikian, dalam hal pengukuran piutang dapat dikatakan bahwa UD. SBHSP telah mengukur piutang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

c) Penyajian Piutang pada UD. SBHSP Sembako

Berdasarkan PSAK No. 101 mengenai Entitas mengungkapkan terkait kelompok aset dalam laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada UD. SBHSP pada saat customer tidak dapat melunasi hutangnya tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dan hasil dari penyitaan barang sebagai perlunasan piutang, UD. SBHSP tidak mencatatnya dalam pendapatan lain-

lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyajian piutang pada UD. SBHSP belum sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku.

d) Pengungkapan Piutang pada UD. SBHSP Sembako

Menurut PSAK No. 101 mengenai piutang yang tidak tertagih diterapkan pada pengakuan pendapatan termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi dan UD. SBHSP dalam menangani piutang tak tertagih menggunakan metode langsung dimana piutang yang tidak dapat tertagih menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Metode ini digunakan karena perusahaan masih dalam kriteria usaha berskala sedang dan tidak melakukan perhitungan akan kerugian piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan atau pencatatan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan piutang telah sesuai dengan pengungkapan piutang berdasarkan PSAK No. 101

2. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang Diterapkan pada UD. SBHSP Serta Kesesuaiannya Dengan SAK Yang Mengatur Tentang Piutang Usaha

Agar lebih memudahkan dalam memahami perbandingan antara perlakuan akuntansi yang diterapkan UD. SBHSP serta kesesuaiannya dengan SAK yang berlaku. Maka peneliti membuat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel IV.2
Analisa Perbandingan Antara Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha
Berdasarkan SAK Dengan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang
Diterapkan UD. SBHSP Sembako

No	Parameter Perbandingan Akuntansi	Berdasarkan PSAK No. 103 dan PSAK No. 101	Berdasarkan UD. SBHSP	Sesuai	Tidak sesuai	Ket.
1	Pengakuan	Berdasarkan PSAK no. 103 menyatakan piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi.	Piutang diakui setelah jasa dan barang selesai diberikan dan telah diterbitkan faktur	✓		Sesuai karena dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi
2	Pengukuran	Pengukuran PSAK No. 103 menyatakan aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui yaitu dengan menentukan besarnya taksiran	Tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan tidak menggunakan metode penyisihan atau cadangan.		✓	Tidak sesuai dikarenakan aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui dengan

		piutang tak tertagih yang nantinya akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan.				pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih setelah mengurangi jumlah atau estimasi piutang tak tertagih.
3.	Penyajian	Berdasarkan PSAK No. 101 Penyajian piutang harus disajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	Penyajian piutang pada UD. SBHSP, disajikan pada neraca dengan jumlah kotor tanpa mengurangi penyisihan piutang tak tertagih		✓	Tidak sesuai karena piutang yang disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih
5	Pengungkapan	Berdasarkan PSAK No. 101 Pengungkapan dilakukan berdasarkan SAK	Tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan		✓	Tidak sesuai karena tidak adanya catatan atas

		ETAP yang dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila ada kebijakan akuntansi yang dilakukan	terkait penjelasan piutang yang disajikan adalah jumlah kotor tanpa dikurangi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih			laporan keuangan dibuat sementara seharusnya seperti tidak adanya penyisihan piutang yang merupakan bagian dari kebijakan akuntansi seharusnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
--	--	---	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa meskipun UD. SBHSP sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, belum seratus persen sesuai dengan SAK yang berlaku. Dari segi pengakuan UD. SBHSP sudah sesuai dengan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 103 dan Ditinjau dari segi pengukuran belum sesuai dengan PSAK No. 103 sedangkan penyajian dan

pengungkapan belum sesuai dengan PSAK No. 101. UD. SBHSP belum sesuai dengan SAK yang berlaku.

C. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun dengan langkah langkah yang sedemikian agar hasilyang diperoleh sebaik mungkin.namun dalam prosesnya, Untuk mendapat hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi penelitian selama melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Keterbatasan wawasan penelitian yang masih kurang.
2. Keterbatasan tenaga, waktu dan dana penulis yang tidak mampu mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Penelitian hanya membatasi masalah hanya pada perlakuan akuntansi piutang usaha.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dari segi pengakuan UD. SBHSP sudah sesuai dengan dengan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 103 Dimana dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi dimana pencatatan piutang dilakukan dengan basis akrual.

Dari segi pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang yang dilakukan UD. SBHSP belum sesuai dengan SAK yang berlaku yaitu SAK ETAP. Karena piutang yang disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih dan hal tersebut tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

B. SARAN

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang menjadi pertimbangan untuk perusahaan sebagai berikut:

1. UD. SBHSP diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pencatatan laporan keuangan piutang yang tidak dapat ditagih kedalam jurnal.
2. Melaksanakan perhitungan estimasi kerugian dalam laporan keuangan agar perusahaan tidak dibingungkan oleh berkurangnya pendapatan.
3. Untuk pencatatan piutang tak tertagih perusahaan disarankan menambah akun beban piutang tak tertagih untuk meenyesuaikan metode dalam penghapusan piutang yaitu metode penghapusan piutang langsung.

4. Untuk UD. SBHSP kedepannya, hendaknya dalam menyajikan laporan keuangan keuangan neraca, khususnya mengenai piutang seharusnya disajikan juga cadangan kerugian piutang untuk mengatasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Belajar Mudah Akuntansi*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- _____. *Akuntansi Keuangan Menengah Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Agus Sartono. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta, 2010.
- Al-Haryono Jusup. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid Satu, Edisi ke Tujuh*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2011.
- _____. *Dasar-Dasar Akuntansi, Buku Dua, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, 2014.
- Al-Qur'an Al-Karim. Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penerjemah A-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI. Semarang: Toha Putra, 1999.
- Anditto Farlinno. "Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Usaha pada PT. Inti Rimba Persada". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015.
- Andrey Hasiholan Pulungan, *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK per Juni 2012*. 2013.
- Aprilia V. Manuel, dkk. "Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT. Sucopindo (Persero) Cabang Jakarta". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12, No. 2, 2017.
- Arfan Ikhsan. *Teori Akuntansi*. Bandung: Madenatera dan Citapustaka, 2013.
- Delima Sari Lubis. "Eksistensi Akuntansi dalam Islam". *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Dian Indudewi. *Akuntansi Keuangan 1*. Semarang: University Press, 2012.
- Donald E. Kieso, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting Volume 1 Edisi IFRS*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Dwi Suwiknyo. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Elfis F. Purba, Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Percerakan Sadia, 2012.
- Elizar Sinambela. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Manufaktur Teori, Soal-Soal, dan Praktikum*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Elly Suhayati, Sri Dewi Anggadini. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ernawati Budi Astuti, dkk. *Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif, Cet, Ketiga*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Renika Hasibuan, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Cetakan Pertama. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Hery. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: CPAS, 2013.
- <http://www.artikata.com>. Diakses 07 Maret 2022 Pukul 19:09 WIB.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ikatan Akuntansi indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 revisi 2011.
- Indah Permata Sari. “Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) pada Usaha UD. Saudara Jaya di Kota Medan. *Skripsi*. (Medan: UINSU, 2021).
- Irmah Halimah Bachtiar, Nurfadila. *Akuntansi Dasar Buku Pintar untuk Pemula*. Yogyakarta: Depublish, 2019.
- Ismie Iswara Akun, dkk. “Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 Atas Impairment Piutang Pada PT. Putra Karangetang. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12, No. 2, 2017.
- Iwan Triyuwono. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Prawiro. Pengertian Akuntansi, Memahami Apa itu Akuntansi, Tujuan, Fungsi, dan Manfaatnya. Diunduh Pada Tanggal 12 Juni 2022.

- Michell Suharli. *Akuntansi untuk Bisnis dan Dagang*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2013.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Rosdian. “Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Pada CV. Hana Sejati Group Banjarmasin”. *Jurnal KINDAI*. Vol. 10, No. 3, 2014.
- Munawar, dkk. *Teori dan Aplikasi Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2021.
- Nur Muhammad Asriadi. “Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Piutang pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar”. *Jurnal Economic Bosowa*. Vol, No. 003, Juli- September 2020.
- _____. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Sparepart pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar”. *Skripsi*. Universitas Bosowa Makassar, 2020.
- Rahman Pura. *Pengantar Akuntansi 1, Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ryfan Racel Rompas, dkk. “Analisis Pengelolaan Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13, No. 3, 2018.
- Saparuddin Siregar. *Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah Sesuai PSAK 109*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.
- Sri Sulistyanto. *Manajemen Laba Cetakan ke II*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendar, dkk. *Pengantar Akuntansi. Cetakan Pertama*. Jakarta: Adab CV. Adanu Abimata, 2020.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sunarno Sastroatmadjo, Eddy Purnairawan. *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2012.

Suradi. *Akuntansi: Pengantar 1*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Syaiful Bahri. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS edisi ke III*. Yogyakarta: Andi, 2016.

Wawancara dengan Bapak Arjun Hasibuan, selaku pemilik UD. SBHSP Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB.

Widana Nur Ardianto. *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Yudi Rahman, Eka Nurliani. "Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang pada CV. Rizky Saputra Hulu Sungai Selatan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Jilid 7, No. 1, Maret 2021.

Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana, 2016.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : SARIPAH AINI LUBIS
Nim : 18 402 00113
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 12 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara
Alamat : Untemanis, Gg. Swadaya II Kelurahan Losung Batu
Agama : Islam
No. Hp : 082360946118

DATA ORANG TUA/ WALI

Nama Ayah : Mahmud Lubis
Pekerjaan : Buruh Tukang
Nama Ibu : Siti Khadijah Daulay
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat: Untemanis, Gg. Swadaya II Kel. Losung Batu

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 200405 Hutaimbaru
Tahun 2012-2015 : MTS Negeri 1 padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2018-2022 : Program Sarjana (S-rata-1) Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Motto Hidup : lebih baik jadi dirimu sendiri daripada berpura-pura menjadi orang lain

Lampiran 1

Pedoman Observasi

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) studi kasus UD. SBHSP Sembako di desa Huristak Kabupaten Padang Lawas. Maka peneliti membuat pedoman observasi tentang perlakuan akuntansi piutang UD. SBHSP Sembako di desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

1. Menganalisis perlakuan akuntansi piutang
2. Membandingkan perlakuan akuntansi piutang usaha dengan SAK yang berlaku

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara dilapangan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi piutang usaha pada UD. SBHSP Sembako di desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

A. Identitas Informan

1. Nama : Arjun Hasibuan
2. Alamat : Desa Huristak Kabupaten Padanglawas
3. Jabatan : Pemilik UD. SBHSP
4. Agama : Islam

B. Daftar Wawancara

1. Kapan berdirinya UD. SBHSP ?
2. Dimana letak UD. SBHSP ini ?
3. Apa visi misi UD. SBHSP ?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang usaha ?
5. Apakah UD. SBHSP sudah menerapkan perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK yang berlaku?

LAMPIRAN 3

Foto pintu masuk toko UD. SBHSP



Foto bagian tengah barang yang ada didalam toko UD. SBHSP

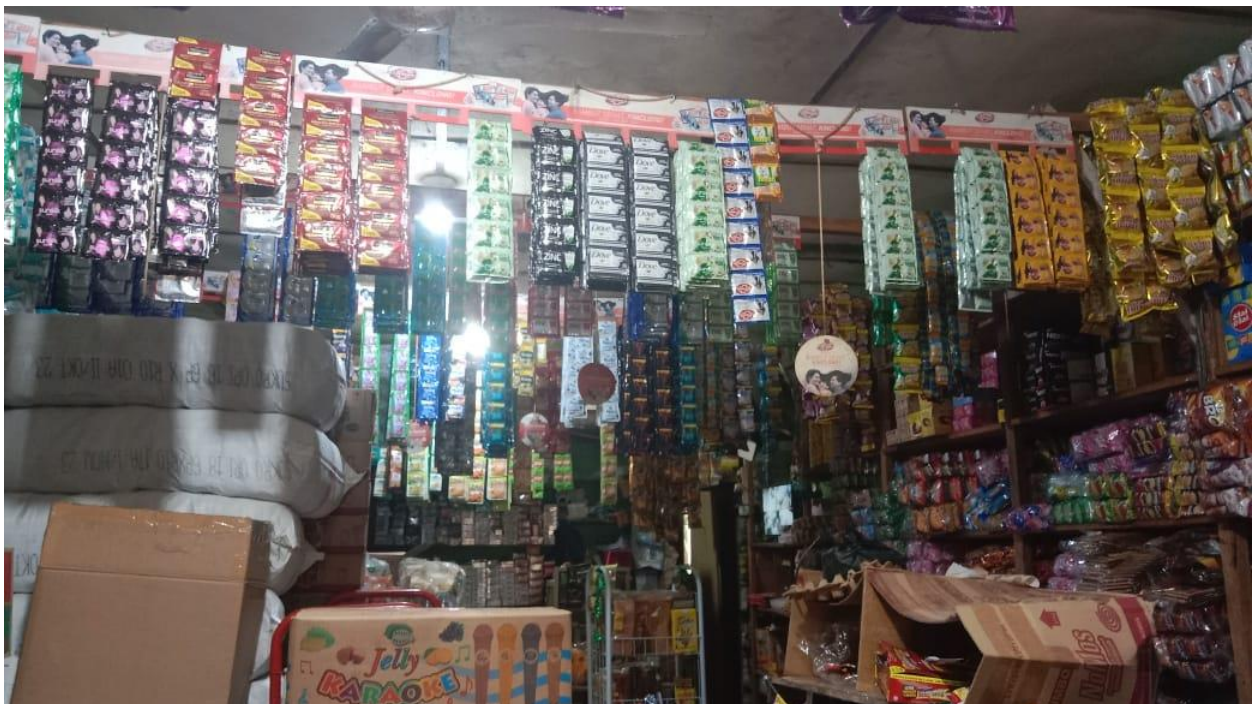


Foto bagian kiri barang yang ada didalam UD. SBHSP.



Foto bagian kanan barang yang ada didalam toko UD. SBHSP.



Foto gudang toko UD. SBHSP



Foto peneliti di UD. SBHSP



Foto wawancara peneliti dengan pemilik usaha UD. SBHSP.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1062 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

12 April 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Arti Damisa : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Saripah Aini Lubis
NIM : 1840200113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), (Studi Kasus UD. SBHSP Sembako Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan


Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3149/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2022
Hal : **Mohon Izin Riset**

12 Desember 2022

Yth. UD. SBHSP Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Saripah Aini Lubis
NIM : 1840200113
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. HSB Sembako di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

UD. SBHSP SEMBAKO
Pasar Huristak, Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas
Kode Pos : 22755

Hal : Balasan Surat Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor : 3149/Un.28/G.4c/TL.00/12/2022, perihal Mohon Izin Riset, maka pemilik toko UD. SBHSP dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saripah Aini Lubis
Nim : 1840200113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah kami setuju untuk melakukan Riset pada UD. SBHSP Sembako guna untuk melengkapi data pada penyusunan skripsi dengan judul ; **Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Studi Kasus UD. SBHSP Sembako di desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pemilik toko UD. SBHSP


Arjun Hasibuan